

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	1
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media :

Halaman : 03

Kompas	Kalteng Pos	Borneo News
Palangka Post	Tabengan <input checked="" type="checkbox"/>	

Segera Realisasikan Anggaran Pandemi dan Insentif Nakes

PALANGKA RAYA – Kalangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk mengkaji lebih dalam terkait realisasi anggaran penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan insentif Tenaga Kesehatan (Nakes) di Bumi Tambun Bungai.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua III DPRD Kalteng Faridawaty Darland Atjeh, saat dikonfirmasi *Tabengan* via *WhatsApp*, Rabu (21/7). Menurutnya, kajian tersebut perlu dilakukan mengingat Kalteng merupakan salah satu dari 19 Provinsi di Indonesia yang mendapat teguran langsung Menteri

Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Tito Karnavian karena rendahnya realisasi anggaran penanganan Covid-19 dan insentif tenaga kesehatan.

“Beberapa kali saya turun langsung untuk pengawasan pelaksanaan vaksin ke puskesmas di sejumlah Kabupaten. Keluhan utama dari dokter dan tenaga kesehatan adalah insentif sering terlambat dibayarkan dan angkanya tidak sesuai dengan tugas berat serta resiko yang mereka hadapi. Bahkan ada yang baru dibayar sampai bulan April dan bisa kita bayangkan bagaimana nasib mereka yang bertugas dipelosok,” ucapnya.

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I, meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas (Gumas) dan Kota Palangka Raya ini juga mengatakan, dalam teguran Mendagri ke 19 Provinsi di Indonesia tanpa terkecuali Kalteng. Dimana, terkadang kepala daerah tidak mengetahui persis angka dari anggaran penanganan Covid-19, baik berapa yang tersisa maupun tertunda realisasinya. Karena yang lebih mengetahui hal tersebut adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) serta Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sambungan

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	1
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media :

Halaman :

Kompas	Kalteng Pos	Borneo News
Palangka Post	Tabengan	

(BKAD).

Kemudian, terlambatnya penyaluran bantuan tunai Covid-19 ke masyarakat dan keterlambatan pembayaran tunjangan Nakes. "Dari 2 poin tersebut, seharusnya mereka justru yang lebih proaktif melaporkan ke kepala daerah dan mendorong yang dibawahnya untuk mere-



Faridawaty Darland Atjeh

alisasikan bantuan ke masyarakat termasuk masalah insentif tenaga kesehatan. Pemerintah pusat jangan terlalu menyalahkan daerah terus,

banyak daerah yang sudah kewalahan mengatur anggaran. Dana Bagi Hasil (DBH)nya dinaikkan dan pemerintah pusat sering terlambat untuk dana transfernya, padahal perintah penanggulangan Covid-19 sering lebih cepat dan ditekankan dari pada tersedianya anggaran,"

tegasnya.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Kalteng ini juga menilai, banyak kebijakan pemerintah pusat

yang terburu-buru keluar. Misalnya saat Surat Edaran (SE) Gubernur ingin dikeluarkan, kebijakannya yang tertuang dalam SE tersebut justru diubah pemerintah pusat dengan mengeluarkan aturan baru.

"Belum selesai masalah kebijakan, muncul lagi wacana Menteri Keuangan (Menkeu) untuk menyiapkan anggaran, tetapi belum wacana disahkan sudah keluar instruksi baru ini dan itu. Bahkan ditengah kesulitan masyarakat karena pandemi, keluar lagi wacana mengenakan pajak ke sejumlah sektor seperti pajak pendidikan dan pajak pangan," ujarnya.

Mengingat kondisi

masyarakat yang semakin terpuruk akibat pandemi, sambungnya, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), seharusnya disesuaikan dengan kondisi yang benar-benar efektif. "Contohnya mengatur jam malam, jangan terlalu fokus menutup usaha masyarakat karena melawan Covid-19, jangan sampai membuat ekonomi kita ambruk. Karena fenomena pandemi saat ini membuat banyak aspek terganggu yang akhirnya berimbas pada turunnya Pendapatan asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)," pungkasnya. nvd